



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Urip Sumohardjo Km.5. Telp. 0411-453486 Fax. 0411-453869
Makassar 90231

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 31 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran

JUNAEDI B., S.Sos, MH
NIP. 19760601 200604 1 017

KATA PENGANTAR

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Satuan Kerja yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Makassar, 31 Desember 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

JUNAEDI B., S.Sos, MH

NIP. 19760601 200604 1 017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Peranan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Bappelitbangda Prov. Sulsel sebagai entitas pelaporan adalah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode APBD Tahun 2020 untuk kepentingan Akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan menyajikan Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020), yang akhirnya dapat digunakan untuk perencanaan penyusunan APBD dan perencanaan pembangunan secara komprehensif. Untuk tujuan tersebut laporan keuangan selaku entitas pelaporan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan OPD dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah disusun dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara Lain :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2020 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bab II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Berisi Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan, Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab III : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Berisi Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pendapatan – LRA, Belanja, Pendapatan – LO, Beban, Asset, Kewajiban, Ekuitas Dana

BAB IV : Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Berisi tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumberdaya OPD, Visi dan Misi, serta Program dan Kegiatan.

BAB V : Penutup.



BAB II**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****2.1. Ikhtisar Realisasi Pendapatan Target Kinerja Keuangan**

Ikhtisar realisasi capaian kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu entitas pelaksana terbagi dalam dua sub bagian yaitu pendapatan daerah tentang retribusi dan belanja daerah.

Pencapaian realisasi anggaran Belanja Daerah sebesar dari Pagu Anggaran sebesar Rp.67.291.548.453 terealisasi sebesar Rp.62.419.289.073 atau (92,76%) ini terjadi dalam rangka mengefesiesikan pelaksanaan anggaran tetapi tidak mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Belanja daerah terbagi lagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung, untuk lebih terperinci ikhtisar realisasi pelaksanaan maka dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi (%)	
					Keu	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH	67.291.548.453	62.419.289.073	4.872.259.380	92,76	98,34
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.549.864.363	29.990.310.634	1.559.553.729	95,06	97,13
	Belanja Gaji dan Tunjangan	13.431.796.068	13.431.525.761	270.307	100,00	100,00
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	18.118.068.295	16.558.784.873	1.559.283.442	91,39	95,00
II	BELANJA LANGSUNG	35.741.684.090	32.428.978.439	3.312.705.651	90,73	99,55
1.	PROGRAM PERENC, PENGENDAL., DAN EVALUASI PEMB. DAERAH	8.779.439.223	8.639.264.451	140.174.72	98,40	100,00
1.	Peny. Dok. Perubahan RPJMD Provinsi	1.343.516.450	1.333.642.500	9.873.950	99,27	100,00
2.	Peny. Dok. RKPDP Propinsi	464.765.768	464.443.482	322.286	99,93	100,00
3.	Pengel & Pengemb. SIPPDP (e-Planning)	50.000.000	50.000.000	0	100,00	100,00
4.	Pengel & Pengemb. SIPD	124.215.800	109.005.600	15.210.200	87,76	100,00
5.	Pengend. & Eva. Perenc. Pemb. Daerah	492.480.300	487.209.453	5.270.847	98,93	100,00
6.	Sinergitas Perenc. & Penganggaran Pemb. Daerah	414.267.913	404.143.413	10.124.500	97,56	100,00
7.	Fasilitasi Tim Gubernur utk Percepatan Pembangunan	5.890.192.992	5.790.820.003	99.372.989	98,31	100,00
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU	1.505.175.271	916.431.659	588.743.612	60,89	100,00

1.	Koordinasi Penyeleng. Penataan Ruang	1.116.980.000	645.567.665	471.412.335	57,80	100,00
2.	Koord. Perenc. Pengemb. Ekonomi Baru dan Kawasan Khusus	388.195.271	270.863.994	117.331.277	69,78	100,00
III	PROGRAM PERENC.PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	970.469.705	925.007.597	45.462.108	95,32	100,00
1.	Peny. Rencana Aksi Daerah/Sustainable Development Goals (SDGs)	277.783.197	264.568.694	13.214.503	95,24	100,00
2.	Peny. Kebijakan/Program Prioritas Kesehatan Sosial	218.127.808	211.489.099	6.638.709	96,96	100,00
3.	Peny. Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan	261.941.200	251.509.943	10.431.257	96,02	100,00
4.	Peny. Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan dan Olahraga	212.617.500	197.439.861	15.177.639	92,86	100,00
IV	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN	2.271.236.112	2.124.084.112	147.152.000	93,52	100,00
1.	Koord. Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	678.659.500	671.594.916	7.064.584	98,96	100,00
2.	Koord. Perencanaan Pengembangan Investasi, Penanaman Modal & PTSP	193.071.052	189.079.563	3.991.489	97,93	100,00
3.	Koord. Pencapaian Indikator Makro	742.872.543	615.661.900	127.210.643	82,88	100,00
4.	Koord. Perencanaan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM	183.409.201	181.094.101	2.315.100	98,74	100,00
5.	Perenc. Pengembangan & Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan	211.872.091	209.323.462	2.548.629	98,80	100,00
6.	Koord. Perencanaan Pengembangan & Pengendalian Tan. Pangan dan Horti.	261.351.725	257.330.170	4.021.555	98,46	100,00
V	PROGRAM PERENCANAAN SUMBERDAYA ALAM	349.649.729	229.762.130	119.887.559	65,71	100,00
1.	Koord. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan SDA dan Lingk. Hidup	349.649.729	229.762.130	119.887.559	65,71	100,00
VI	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR & KEWILAYAHAN	5.562.650.000	5.432.912.800	129.737.200	97,67	100,00
1.	Koord. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	231.250.000	149.997.200	81.252.800	64,86	100,00
2.	Koord. Pelaksanaan Program IPDMIP	4.600.000.000	4.599.149.700	850.300	99,98	100,00
3.	Koord. Perencanaan Pengembangan Wilayah	460.000.000	425.227.300	34.772.700	92,44	100,00
4.	Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Provinsi	271.400.000	258.538.600	12.861.400	95,26	100,00
VII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.918.673.908	7.591.636.123	327.037.785	95,87	100,00
1.	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	43.450.000	28.373.860	15.076.140	65,30	100,00
2.	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	4.411.632.600	4.339.187.000	72.445.600	98,36	100,00

3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	308.247.053	307.499.053	748.147	99,76	100,00
4.	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.877.150.000	1.648.755.900	228.394.100	87,87	100,00
5.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1.278.194.108	1.267.820.310	10.373.798	99,19	100,00
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.329.913.700	2.850.925.152	478.988.548	85,62	100,00
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama	1.651.975.000	1.401.632.552	250.342.448	84,85	100,00
2.	Pemel. Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	463.209.000	462.309.700	899.300	99,81	100,00
3.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	942.229.700	715.697.900	226.531.800	75,96	100,00
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	272.500.000	271.285.000	1.215.000	99,55	100,00
IX	PROGRAM PENINGKATAN PERENC., PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	931.702.000	885.307.339	46.394.661	95,02	100,00
1.	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	630.716.200	591.138.539	39.577.661	93,72	100,00
2.	Penyusunan dan Pengelolaan Adm. Keuangan	300.985.800	294.168.800	6.817.000	97,74	100,00
X	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	356.226.000	183.492.900	172.733.100	51,51	100,00
1.	Penyusunan dan Pengelolaan Adm. Kepegawaian	197.496.000	183.492.900	14.003.100	92,91	100,00
2.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya	158.730.000	0	158.730.000	0,00	100,00
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN	871.730.142	633.621.211	238.108.931	72,69	97,05
1.	Penguatan Kluster Inovasi	104.100.000	103.237.992	862.008	99,17	100,00
2.	Pengemb. Riset pada Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan	514.750.142	279.461.503	235.288.639	54,29	95,00
3.	Laboratorium Inovasi	163.350.000	161.939.716	1.410.284	99,14	100,00
4.	Revitalisasi Kebun Raya Pucak	89.530.000	88.982.000	548.000	99,39	100,00
XII	PROGRAM KELITBANGAN DAN PEMANFAATAN IPTEK DAERAH	2.894.818.300	2.016.532.965	878.285.335	69,66	95,39
1.	Pemeliharaan Benih Eksplorasi dan Tanaman Koleksi	18.075.000	18.075.000	0	100,00	100,00
2.	Eksplorasi Tumbuhan Sulawesi	9.570.000	9.570.000	0	100,00	100,00

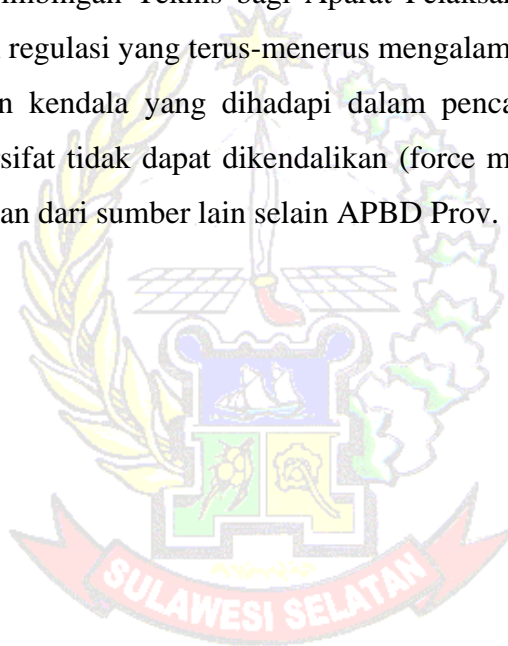
3.	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Sulsel	96.500.000	83.500.000	13.000.000	86,53	95,00
4.	Pengembangan Kebijakan dan Isu-isu Strategis Sektor Pemerintahan	2.572.423.300	1.709.577.965	862.845.335	66,46	95,00
5.	Peningkatan Kualitas Kelitbangan Utama	198.250.000	195.810.000	2.440.000	98,77	100,00

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan mengalami kendala antara lain:

1. Masih perlu adanya Pelatihan dalam penerapan sistem aplikasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah terkhusus dalam lingkup OPD;
2. Pelaksanaan bimbingan Teknis bagi Aparat Pelaksana Administrasi Keuangan tidak seiring dengan regulasi yang terus-menerus mengalami perubahan;

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yang bersifat tidak dapat dikendalikan (force major) dikarenakan belum adanya dukungan pembiayaan dari sumber lain selain APBD Prov. Sulsel



BAB III**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****3.1. PENDAPATAN**

Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel tidak terdapat Target Pendapatan.

3.2. BELANJA

2020		2019
Anggaran	Realisasi	Realisasi
67.291.548.453,00	62.419.289.073,00	45.203.423.956,00

Untuk belanja daerah dialokasikan pada Bappelitbangda Prov. Sulsel sebagai suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp.67.291.548.453,00 sampai dengan pelaksanaan akhir tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp.62.419.289.073,00 atau 92,76%, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.872.259.380,00 atau 7,24%. Realisasi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan belanja mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 yang terealisasi sebesar Rp. 45.203.423.956,00 Informasi tentang rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi

2020		2019
Anggaran	Realisasi	Realisasi
64.897.293.753,00	60.435.209.173,00	43.013.405.876,00

Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.64.897.293.753,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.60.435.209.173,00 atau 93,12% terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.462.084.580,00 atau 6,88%. Berdasarkan realisasi anggaran jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.43.013.405.876,00 mengalami peningkatan realisasi. Rincian belanja operasi sebagai berikut:

Belanja Operasi terdiri dari:

No.	Jenis Belanja Operasi	2020			2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai	31.779.081.363,00	30.217.675.634,00	95,08	21.002.585.878,00
2	Belanja Barang dan Jasa	33.118.212.390,00	30.217.533.539,00	91,24	22.010.819.998,00
Jumlah		64.897.293.753,00	60.435.209.173,00	93,12	43.013.405.876,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp.31.779.081.363,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.30.217.675.634,00 atau 95,08%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.561.405.729,00 atau 4,92%. Tidak terserapnya Belanja Pegawai tersebut disebabkan oleh adanya Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember 2020 yang belum terbayarkan. Realisasi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan belanja mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.43.013.405.876,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja Pegawai	2020			2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Gaji dan Tunjangan	13.661.013.067,80	13.658.890.761,00	99,98	9.185.071.195,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	18.118.068.295,20	16.558.784.873,00	91,39	11.817.514.683,00
Jumlah		31.779.081.363,00	30.217.675.634,00	95,08	21.002.585.878,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp.31.118.212.390,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.30.217.533.539,00 atau 97,10% terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.900.678.851,00 atau 2,90%. Sisa Anggaran tersebut merupakan penghematan Belanja Barang dan Jasa. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp.22.010.819.998,00, realisasi ditahun 2020 mengalami kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	2020			2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bahan Pakai Habis	243.836.900,00	243.404.033,00	99,82	280.553.792,00
2	Belanja Bahan/Material	20.075.000	20.075.000	100,00	0
3	Belanja Jasa Kantor	14.366.227.846,00	14.082.491.171,00	98,02	11.046.788.624,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	531.089.000,00	515.113.560,00	96,99	348.326.000,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.972.300,00	699.496.580,00	95,51	729.165.550,00
6	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/ Parkir	8.500.000,00	8.450.000,00	99,41	22.377.166,00
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	264.500.000,00	263.700.000,00	99,70	0,00
8	Belanja Makanan dan Minuman	2.016.520.000,00	1.787.765.900,00	88,66	1.336.915.000,00
9	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	158.730.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Perjalanan Dinas	9.653.091.344,00	9.312.274.295,00	96,47	7.600.374.866,00
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	841.850.000,00	825.600.000,00	98,07	27.200.000,00
14	Belanja Pemeliharaan	397.500.000,00	393.035.000,00	98,88	594.248.000,00
15	Belanja Jasa Konsultasi	3.915.320.000,00	2.096.128.000,00	53,54	24.871.000,00
Jumlah		33.118.212.390,00	30.217.533.539,00	91,24	22.010.819.998,00

b. Belanja Modal

2020		2019
Anggaran	Realisasi	Realisasi
2.394.254.700,00	1.984.079.900,00	2.190.018.080,00

Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.2.394.254.700,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.984.079.900,00 atau 82,87% Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar

Rp.410.174.800,00 atau 17,13%, realisasi tersebut menurun dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019.

Belanja Modal terdiri dari:

No.	Jenis Belanja Modal	2020		2019
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	842.229.700,00	615.927.900,00	874.147.080,00
3	Gedung dan Bangunan	1.452.025.000,00	1.268.382.000,00	975.172.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	194.469.000,00
5	Asset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Asset Lainnya	100.000.000,00	99.770.000,00	146.230.000,00
	Jumlah	2.394.254.700,00	1.984.079.900,00	2.190.018.080,00

1) Belanja Tanah

Tidak ada pengadaan.

2) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.842.229.700,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.615.927.900,00 atau 73,13%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp.226.301.800,00 atau 26,87%. Tidak terserapnya anggaran merupakan efisiensi atas belanja modal. Realisasi tersebut menurun dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.874.147.080,00.

Rincian Belanja Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

No.	Belanja Modal Pengadaan	2020			2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	35.925.000,00
3	Perlengkapan Kantor	94.392.000,00	88.000.000,00	93,23	81.340.000,00
4	Personal Komputer	488.440.700,00	339.130.750,00	69,43	373.291.460,00
5	Perlitan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	93.050.400,00
6	Meubelair	78.000.000,00	77.990.000,00	99,99	111.980.000,00
7	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	0,00	0,00	0,00	19.327.000,00
8	Penghias Ruangan Rumah Tangga	29.400.000,00	21.347.200,00	72,61	0,00
9	Alat-Alat Studio	127.997.000,00	65.459.950,00	51,14	25.050.220,00
10	Alat-Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	123.783.000,00
11	Peralatan Dapur	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	10.400.000,00
12	Pembelian Konstruksi / Bangunan / Alat-alat Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		842.229.700,00	615.927.900,00	98,20	874.147.080,00

3) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja pengadaan konstruksi/pembelian bangunan direncanakan sebesar Rp.1.452.025.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.268.382.000,00 atau 87,35%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp.183.643.000,00.

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak ada pengadaan.

5) Belanja Asset Tetap Lainnya

Tidak ada pengadaan

6) Belanja Asset Lainnya

Belanja pengadaan asset lainnya direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.99.770.000,00 atau 99,77%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp.230.000,00.

3.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. Pendapatan (LO)

Tidak ada pendapatan (LO)

b. Beban

2020	2019
65.180.471.788,84	43.718.373.120,00

Pada Tahun Anggaran 2020 Beban bersaldo sebesar Rp.65.180.471.788,84. dibandingkan tahun 2019 mengalami kenaikan.

Informasi tentang rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah yang terdiri dari:

No.	Jenis Beban Operasi	2020	2019
1	Beban Pegawai	31.706.121.323,00	21.002.585.878,00
2	Beban Persediaan	2.674.662.613,00	2.256.193.592,00
3	Beban Jasa	20.013.440.653,00	11.557.895.517,00
4	Beban Pemeliharaan	393.035.000,00	594.248.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas	9.312.274.295,00	7.600.374.866,00
6	Beban Bunga	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00
8	Beban Hibah	0,00	0,00
9	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.080.937.904,84	707.075.267,00
11	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
12	Beban Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah		65.180.471.788,84	43.718.373.120,00

1) Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.31.706.121.323,00

Beban Pegawai terdiri dari:

No.	Jenis Beban Pegawai	2020	2019
1	Beban Gaji dan Tunjangan	13.431.525.761,00	9.185.071.195,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	18.047.230.562,00	11.817.514.683,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00
4	Beban Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00
5	Beban Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00
6	Uang Lembur	227.365.000,00	0,00
7	Honorarium PNS	0,00	0,00
Jumlah		31.706.121.323,00	21.002.585.878,00

2) Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.674.662.613,00

Beban Persediaan terdiri dari:

No.	Jenis Beban Persediaan	2020	2019
1	Beban Bahan Pakai Habis	268.618.233,00	278.792.892,00
2	Beban Persediaan Bahan / Material	0,00	0,00
3	Beban Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	201.530.650,00	247.871.000,00
4	Beban Cetak	290.347.830,00	392.614.700,00
5	Beban Makanan dan Minuman	1.914.165.900,00	1.336.915.000,00
Jumlah		2.674.662.613,00	2.256.193.592,00

3) Beban Jasa

Saldo Beban Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.20.013.440.653,00.

Beban Jasa terdiri dari:

No.	Jenis Beban Jasa	2020	2019
1	Beban Jasa Kantor	14.148.908.993,00	11.046.441.501,00
2	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor (excl. BBM)	313.582.910,00	100.455.000,00
3	Beban Penggandaan	379.148.750,00	336.550.850,00
4	Beban Sewa	272.150.000,00	22.377.166,00
5	Beban Pakaian Dinas	158.730.000,00	0,00
6	Beban Pakaian Kerja Lapangan	0,00	0,00
7	Beban Pakaian Khusus	0,00	0,00
8	Beban Pemulangan Pegawai	0,00	0,00
9	Beban Jasa Konsultasi	3.915.320.000,00	24.871.000,00
10	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	825.600.000,00	27.200.000,00
Jumlah		20.013.440.653,00	11.557.895.517,00

4) Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.393.035.000,00.

Beban Pemeliharaan terdiri dari:

No.	Jenis Beban Pemeliharaan	2020	2019
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	393.035.000,00	150.276.000,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	298.387.000,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	145.585.000,00
Jumlah		393.035.000,00	594.248.000,00

5) Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.312.274.295,00

Beban Perjalanan Dinas terdiri dari:

No.	Jenis Beban Perjalanan Dinas	2020	2019
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.736.687.724,00	3.363.480.950,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.575.586.571,00	3.896.083.878,00
3	Beban Tambahan Perjalanan Dinas	0,00	340.810.038,00
Jumlah		9.312.274.295,00	7.600.374.866,00

6) Beban Bunga

Saldo Beban Bunga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0,-

7) Beban Hibah

Saldo Beban Hibah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0,-

8) Beban Penyusutan

Saldo Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.080.937.904,84

Beban Penyusutan terdiri dari :

No.	Jenis Beban Penyusutan	2020	2019
1	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	929.114.073,57	640.735.656,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	116.741.030,78	53.928.099,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	35.082.800,49	12.411.512,00
Jumlah		1.080.937.904,84	707.075.267,00

3.4. NERACA

Neraca digunakan untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Asset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

a) Asset

31 Desember 2020	31 Desember 2019
41.064.656.979,44	39.814.199.584,28

Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, yang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Asset Lancar	1.714.400,00	6.853.600,00
2	Asset Tetap	39.626.426.079,44	38.470.599.484,28
3	Asset Lainnya	1.436.516.500,00	1.336.746.500,00
Jumlah		41.064.656.979,44	39.814.199.584,28

1) Asset Lancar

31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.714.400,00	6.853.600,00

Asset Lancar meliputi kas dan setara kas, piutang lainnya, dan persediaan. Nilai Asset Lancar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp.1.714.400,00** dan **Rp.6.853.600,00** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Piutang Lainnya	0,00	0,00
4	Persediaan	1.714.400,00	6.853.600,00
Jumlah		1.714.400,00	6.853.600,00

a) **Kas di Bendahara Penerimaan**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

b) **Kas di Bendahara Pengeluaran**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

c) **Piutang Lainnya**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
0,00	0,00

Saldo Piutang Lain per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0,00**.

d) **Persediaan**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.714.400,00	6.853.600,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.1.714.400,00**.

2) **Asset Tetap**

Asset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Asset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Asset Tetap Lainnya, dengan saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp.39.626.426.079,44 dan Rp.38.470.599.484,28

a) Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp.20.134.597.040,00 merupakan asset tanah yang dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	20.134.597.040,00
Realisasi Belanja Modal TA 2019	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	20.134.597.040,00

b) Peralatan dan Mesin

Merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar **Rp19.831.076.109,00** Asset Peralatan dan Mesin dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	19.500.487.609,00
Realisasi Belanja Modal TA 2019	<u>Rp</u>	<u>330.588.500,00</u>
Jumlah	Rp	19.831.076.109,00

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan., yang terdiri dari:

Bangunan Gedung merupakan nilai Bangunan Gedung per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.12.665.292.648,40** terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	11.237.620.648,00
Realisasi Belanja Modal TA 2019	<u>Rp</u>	<u>1.427.672.000,40</u>
Jumlah	Rp	12.665.292.648,40

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Bangunan Air Irigasi, Instalasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah. Saldo Jalan, Irigasi dan Jembatan per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Bangunan Air Irigasi merupakan nilai Bangunan Air Irigasi per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.1.343.999.700,00** terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	1.343.999.700,00
Realisasi Belanja Modal TA 2019	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	1.343.999.700,00

e) Asset Tetap Lainnya

Asset Tetap Lainnya merupakan nilai Asset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.1.329.397.850,00**

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	1.329.397.850,00
Realisasi Belanja Modal TA 2019	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	1.329.397.850,00

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan nilai Asset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	0,00
Realisasi Belanja Modal TA 2019	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	0,00

g) Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyusutan nilai asset tetap sebagai dasar Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Kapitalisasi Asset Tetap dan Penyusutan Asset. Nilai akumulasi penyusutan asset tetap Per 31 Desember 2020 sebesar **Rp15.677.937.267,96** terdiri dari :

(1) Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin merupakan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 yaitu :

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	12.744.131.186,45
Penyusutan T.A. 2019	<u>Rp</u>	<u>929.114.073,57</u>
Jumlah	Rp	13.673.245.260,02

(2) Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan merupakan nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	1.397.289.972,00
Penyusutan T.A. 2019	<u>Rp</u>	<u>116.741.030,78</u>
Jumlah	Rp	1.514.031.002,78

(3) Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan nilai akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	455.158.204,67,00
Penyusutan T.A. 2019	Rp	<u>35.082.800,49</u>
Jumlah	Rp	490.241.005,16

(4) Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya merupakan nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	420.000,00
Penyusutan T.A. 2019	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	420.000,00

3) Asset Lainnya

31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.436.516.500,00	1.336.746.500,00

Asset Lainnya terdiri dari Asset Tak Berwujud yang merupakan belanja pengadaan program (software) pada tahun 2020 sebesar **Rp.1.436.516.500,00** yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	1.336.746.500,00
Realisasi Belanja Modal TA 2019	Rp	<u>99.770.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.436.516.500,00

4) Kewajiban

31 Desember 2020	31 Desember 2019
3.988.512.278,00	865.767,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah yang terdiri dari :

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Kewajiban Jangka Pendek	3.988.512.278,00	865.767,00

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Jumlah	3.988.512.278,00	865.767,00

b. Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek

Utang Beban

31 Desember 2020	31 Desember 2019
3.988.512.278,00	865.767,00

Utang beban merupakan nilai utang beban per 31 Desember 2020 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	865.767,00
Utang Beban Listrik, Telepon, Air T.A. 2020	Rp	<u>3.987.646.511,00</u>
Jumlah	Rp	3.988.512.278,00

2) Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2020	31 Desember 2019
0,00	0,00

Utang beban merupakan nilai utang beban per 31 Desember 2020 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	0,00
Utang Jangka Panjang T.A. 2020	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	0,00

c. Ekuitas

31 Desember 2020	31 Desember 2019
37.076.144.701,44	39.813.333.817,28

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pengungkapan Atas Pos Pos Asset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja Serta Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

d. Utang Beban

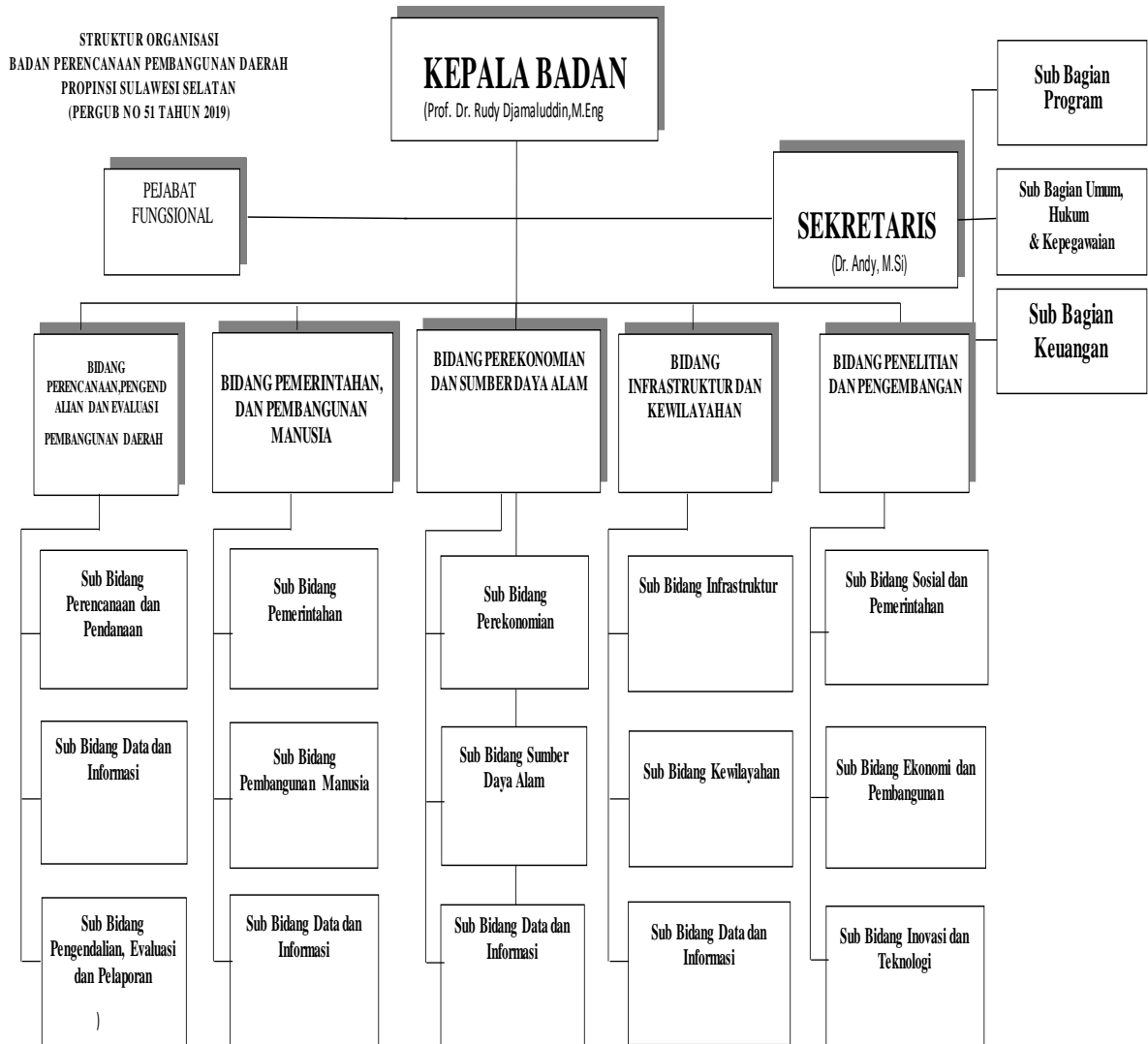
Utang beban timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas belanja Listrik, Air dan Telepon pada periode Desember 2020 yang terdiri dari :

Jenis Utang	Saldo	Keterangan
Utang Beban Barang dan Jasa		
- Utang Beban Jasa Telepon	3.988.512.278,00	Per Desember 2020
- Utang Beban Jasa Air	0,00	Per Desember 2020
- Utang Beban Jasa Listrik	0,00	Per Desember 2020
Utang Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	Per Desember 2020
Jumlah	0,00	



BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN OPD

4.1. Struktur Organisasi



4.2. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2019-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Program teknis: Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.
- b. Program generik :
 - 1) Program generik 1: Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis.
 - 2) Program generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 3) Program generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.



4.3 Sumber Daya

**GAMBARAN UMUM GOLONGAN PEGAWAI
BERDASARKAN PENDIDIKAN UMUM
PADA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

GOLONGAN PEGAWAI		PENDIDIKAN UMUM								JML	JENIS KELAMIN		JML	JABATAN FUNGSIONAL	
		SD	SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3		L	P		JML	TERISI
Gol. IV	IV/d	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1
	IV/c	-	-	-	-	-	1	7	1	8	1	8	9	9	9
	IV/b	-	-	-	-	-	4	9	5	18	9	9	18	18	11
	IV/a	-	-	-	-	-	2	32	-	34	17	17	34	16	16
	Sub Total	-	-	-	-	-	7	49	6	62	27	35	62	44	37
Gol. III	III/d	-	-	-	-	1	24	6	-	31	15	16	31	19	9
	III/c	-	-	-	-	-	13	13	-	26	14	12	26	3	3
	III/b	-	-	1	-	6	22	2	-	31	19	12	31	5	5
	III/a	-	-	2	-	1	12	-	-	15	9	6	15	3	3
	Sub Total	-	-	3	-	8	71	21	-	103	57	46	103	30	20
Gol. II	II/d	-	-	10	1	-	-	-	-	12	8	4	12	-	-
	II/c	-	-	9	-	-	-	-	-	8	7	1	8	-	-
	II/b	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-
	II/a	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	Sub Total	-	-	21	1	-	-	-	-	22	16	6	22	-	-
Gol. I	I/d	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	3	-	-
TOTAL		3	0	24	1	8	78	70	6	190	103	87	190	74	57

4.4. Visi dan Misi

Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra OPD. Untuk mendukung hal tersebut, maka diharapkan adanya kemajuan terhadap capaian kinerja pembangunan pada BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Berdasarkan hasil capaian pelaksanaan rencana strategis BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, serta tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan, maka dirumuskan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 sebagai berikut:

A. Visi

Visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lima tahun kedepan (2018 – 2023) sebagai berikut :

**“ Sulawesi Selatan yang
Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter “**

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya, yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rakaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, yakni.

1. Inovatif

Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.

2. Kompetitif

Kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”.

3. Produktif

Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.

4. Inklusif

Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.

5. Berkarakter

Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif.

Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang reponsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi.

2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel.

Membangun infrastruktur dalam menguatkan inter-konektivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir.

3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif.

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah.

4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter.

Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan ipteks tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.

5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

A	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (PRIORITAS)
1	Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
2	Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan
3	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Planning)
4	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
5	Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
7	Fasilitasi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU (PRIORITAS)
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
2	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Baru Dan Kawasan Khusus
C	Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
1	Penyusunan Rencana Aksi Daerah/ Sustainable Development Goals (SDGs)
2	Penyusunan Kebijakan/ Program Prioritas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
3	Penyusunan Kebijakan/ Program Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan
4	Penyusunan Kebijakan/ Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Dan Olahraga
D	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN
1	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan
2	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Investasi, Penanaman Modal dan PTSP
3	Koordinasi Pencapaian Indikator Makro
4	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM
5	Perencanaan Pengembangan Dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan
6	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Tanaman Pangan dan Hortikultura
E	PROGRAM PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM
1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengelolaan SDA Dan Lingkungan Hidup
F	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

1	Koordinasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2	Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP
3	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
4	Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Provinsi
G	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
3	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan
5	Penyediaan Makanan dan Minuman
6	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
H	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor/ Asrama
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/ Dinas
3	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
I	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
1	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
2	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
J	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Korpri beserta kelengkapannya
K	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAH
1	Penguatan Kluster Inovasi
2	Pengembangan Riset pada Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan
3	Laboratorium Inovasi
4	Revitalisasi Kebun Raya Pucak
L	PROGRAM KELITBANGAN DAN PEMANFAATAN IPTEK DAERAH

1	Pemeliharaan Benih Eksploitasi dan Tanaman Koleksi
2	Eksploitasi Tumbuhan Sulawesi
3	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulsel
4	Pengembangan Kebijakan dan Isu-isu Strategis Sektor Pemerintahan
5	Peningkatan Kualitas Kelitbang Utama



BAB VI

PENUTUP

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas Pokok dan fungsinya memerlukan biaya-biaya (Anggaran) dalam pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan. mempunyai tanggungjawab pelaksanaan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Untuk anggaran Belanja daerah yang dikelola di Bappelitbangda Prov. Sulsel sebesar Rp.67.291.548.453,00 terealisasi sebesar Rp.62.419.289.073,00 atau 92,76% dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Pada Belanja Tidak Langsung, direncanakan sebesar Rp.31.549.864.363,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.29.990.310.634,00 atau 95,06% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.559.553.729,00.

2. Belanja Langsung

Untuk Belanja Langsung teralokasikan anggaran sebesar Rp.35.741.684.090,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.32.428.978.439,00,- atau 90,73% yang terbagi lagi menjadi tiga rekening belanja yaitu :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp.229.217.000,00 terealisasi sebesar Rp.227.365.000,00 atau 99,19%, terdapat sisa sebesar Rp.1.852.000,00 yang tidak terealisasikan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.33.118.212.390,00 terealisasi sebesar Rp.30.217.533.539,00 atau 91,12% terdapat sisa sebesar Rp.2.900.678.851,-

c. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp.2.394.254.700,00 terealisasi sebesar Rp.1.984.079.900,00 atau 82,87% terdapat sisa sebesar Rp.410.174.800,00